

## PENINGKATAN

### PRODUKSI PESAWAT PTDI

Pilot uji PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Kapten Esther Gayatri turun dari pesawat Pesut CN235 MPA di lapangan hanggar Pesawat PTDI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/6). Kementerian Pertahanan mengharapkan terus ditingkatkannya kinerja produksi pesawat buatan PTDI mulai dari peningkatan jumlah pesawat CN235 yang direncanakan lima tahun ke depan mencapai minimal 20 unit hingga kemampuan dalam produksi pesawat tempur guna penguatan alutsista militer Indonesia.



FOTO/ANT

## OJK-Bappenas Sinergikan Kebijakan Jasa Keuangan dan Rencana Pembangunan

Sektor jasa keuangan memiliki peran krusial, terutama dalam mengoptimalkan dampak ganda dari kebijakan dan stimulus dari pemerintah, kata Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso.

JAKARTA (IM) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sepakat mensinergikan kebijakan sektor jasa keuangan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan sektor jasa keuangan memiliki peran krusial, terutama dalam mengoptimalkan dampak ganda dari kebijakan dan stimulus dari pemerintah. "Kita tahu bahwa tanpa

sektor jasa keuangan, rasanya sulit kita memberikan dampak berantai yang optimal. Semua stimulus dan anggaran pemerintah supaya tidak mandeg, sektor keuangan harus me-multiplier-kan sehingga kebijakan-kebijakan sektor keuangan ini memang harus sinkron dengan ekspektasi pemerintah melalui pembangunan jangka menengah panjang," ujar Wimboh saat penandatanganan nota kesepahaman OJK dan Bappenas di Jakarta, Rabu (15/6).

Wimboh menyampaikan OJK telah menerbitkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang menjadi acuan bagi

seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Dalam master plan tersebut, lanjut Wimboh, dijelaskan bagaimana pendalaman sektor jasa keuangan menjadi penting dan sektor keuangan syariah bisa menjadi tulang punggung ke depan sehingga ada master plan pengembangan keuangan syariah.

"Dan juga ada bagaimana peran UMKM ke depan. Jadi banyak master plan - master plan yang barangkali nanti bisa kita sinkronkan karena sekarang ini untuk UMKM banyak sekali kebijakan stimulus yang hampir setiap kementerian/ lembaga ada. Bagaimana kita Bahasa Jawa-nya gatuk-kan jadi satu, ini belum ada wadahnya," kata Wimboh.

Wimboh juga menyeroi terkait perkembangan keuangan digital yang begitu

pesat seiring dengan inovasi teknologi yang semakin canggih. Masyarakat mulai banyak yang tertarik dengan pinjaman daring, aset kripto, dan lainnya.

"Ini tapi ada juga excess-nya. Selama ini kita sendiri saja dengan kementerian/ lembaga lain, tapi ini mestinya jadi perhatian nasional. Bahkan sekarang ini ada Kominfo yang sangat sempit perannya. Policy digital-nya ada di mana, gak jelas. Policy digital economy kita ada di mana? Masing-masing kementerian concern, cuma ini harus ada guidance hukum. Jadi banyak sekali produk digital yang gak jelas regulatornya siapa," ujar Wimboh.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya sangat berharap sektor jasa keuangan ke depan bisa disinergikan dan diselarakan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional. "Arah dan prioritas pem-

angunan nasional setiap waktu dalam periode tahunan kita telurkan dalam rencana kerja pemerintah. Contoh pada tahun yang akan datang ini temanya adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, sehingga diharapkan sektor jasa keuangan juga bisa ke arah sana. Alangkah baiknya kita sudah bisa tarik garis itu lebih awal sehingga trennya itu bisa bersama-sama kita ikuti," ujar Suharso.

Sinergi OJK dan Bappenas diharapkan bisa memaksimalkan peranan intermediasi sektor jasa keuangan dalam mendukung pengembangan sektor riil dan mendorong pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi, sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). • vdp



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## Inflasi Tahun 2022 Diperkirakan Meningkat Mencapai 4,2 Persen

JAKARTA (IM) - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memperkirakan inflasi yang diukur atas Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2022 akan meningkat hingga mencapai 4,2 persen.

"Namun inflasi inti dan ekspektasi inflasi masih bisa terkendali di dalam kisaran dua persen sampai empat persen pada tahun ini dan tahun depan," ungkap Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Seminar bertajuk "Managing Inflation to Boost Economic Growth" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/6).

Dengan demikian hal itu menjadi cerminan koordinasi fiskal dan moneter yang sangat kuat, di mana fiskal meningkatkan subsidi sehingga tidak semua kenaikan harga energi dan komoditas dunia berdampak kepada inflasi dalam negeri dan BI ikut berpartisipasi dalam pembiayaan anggaran negara tahun ini.

Koordinasi tersebut, kata dia, berhasil menahan dampak

dari kenaikan harga komoditas yang tinggi baik harga energi maupun harga pangan dunia terhadap inflasi di Tanah Air. Kondisi Indonesia, lanjutnya, tentunya berbeda dengan negara-negara lain yang kini sedang mengalami lonjakan inflasi yang tinggi hingga mencapai dua digit.

Menurut Perry Warjiyo, langkah pemerintah dalam meningkatkan subsidi khususnya Premium, diesel, listrik, LPG, dan meningkatkan bantuan sosial sangat membantu menyikapi kenaikan harga energi dan pangan dunia. "Sementara harga-harga Pertamina, Pertalite, dan bahan bakar non-subsidi itu memang naik," jelasnya.

Di sisi lain Perry Warjiyo menuturkan pada tahun ini BI juga masih berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp224 triliun untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan. • vit

## Tahun 2022 Bina Buana Raya Tetap Fokus di Segmen OSV



Direksi PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.

JAKARTA (IM) - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) terus melakukan pembenahan dan upaya strategis di tahun 2022 ini.

Direktur Utama BBRM, Na'im Machzyumi mengatakan upaya manajemen di tahun 2022 ini, yaitu Perseoran akan tetap fokus pada segmen bisnis jasa penunjang lepas pantai OSV (*offshore support vessel*) untuk antisipasi *recovery* industri minyak dan gas bumi dengan penyediaan armada yang efisien dan berteknologi tinggi.

Kemudian memperluas basis pelanggan di sektor minyak dan gas lepas pantai serta mengejar peluang di pasar peletakan kabel dan energi angin lepas pantai.

Melakukan penambahan armada OSV dengan menandatangani per-

janjian jual beli kapal penunjang lepas pantai MP Perkasa dan MP Pride dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd pada 16 Oktober 2020.

Selain itu pengaturan arus kas yang lebih baik, termasuk opsi penjualan kapal yang berumur tua dan tidak efisien untuk menunjang operasional Perseoran.

"Untuk prospek industri di tahun 2022 ini, adanya peningkatan harga minyak dunia pada quarter terakhir 2021 berakibat pada peningkatan permintaan kapal penunjang lepas pantai. Perusahaan akan berfokus pada pasar kapal Self Propelled Barge," tambahnya dalam paparan Public Expose secara virtual, Rabu (15/6).

Dalam paparan *public expose* tersebut, Perseoran merilis laporan laba

rugi konsolidasian 2021.

Pendapatan pada segmen kapal penunjang lepas pantai turun 33 persen disebabkan penurunan armada penunjang lepas pantai, dimana di tahun 2020 Perseoran masih memiliki 6 armada kapal OSV (*offshore support vessel*), sedangkan di tahun 2021 Perseoran hanya memiliki 3 armada kapal OSV.

Terdapat perbaikan dalam laba bruto dan laba periode berjalan seiring dengan menurunnya beban langsung Perseoran akibat penurunan jumlah armada kapal Perseoran dan efisiensi yang dilakukan Perseoran terhadap beban operasional baik dari segi pemakaian bahan bakar maupun dari segi gaji dan upah. • kris

## Zulkifli Hasan Percaya Diri Bisa Atasi Masalah Minyak Goreng

JAKARTA (IM)- Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan memberikan pernyataan pertama usai dilantik jadi pembantu baru Jokowi. Ia mengatakan akan segera melaksanakan tugas yang diberikan Jokowi.

Salah satunya, tugas mengatasi kemelut kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng. Ia berjanji akan segera menyelesaikan masalah itu.

"Hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau ini tidak dilaksanakan dengan cepat," katanya di Istana Rabu (15/6).

Ia percaya diri bisa mengatasi masalah itu. Keyakinan ia dasarnya pada latar belakang serta pengalaman panjangnya.

"Saya kira *background* pengalaman saya yang panjang bisa banyak membantu segera menyelesaikan masalah ketersediaan

minyak goreng di manapun dengan harga terjangkau. Itu yang paling penting," katanya.

Zulkifli ditunjuk menjadi menteri perdagangan menggantikan M.Lutfi dalam *reshuffle* kabinet yang dilakukan Jokowi hari ini. Ia dilantik bersama dengan Hadi Tjahjanto yang diangkat Jokowi menjadi menteri agraria dan tata ruang (ATR)/ kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. • vit

FIT HUB

MASIH JAMAN NGE-GYM MAHAL?

Rp 249 RIBU PER BULAN

FREE PROGRAMS

WEIGHT TRAINING - ZUMBA - FIT BOX - YOGA - DANCE

CONTACT US

0896 3968 3630

@fithub\_id | fithub.id